

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Damanik, Pandapotan. Hukum Administrasi Negarateori, Prinsip, Dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan. PT Media Penerbit Indonesia. Kota Medan: 2024
- KOSASIH, ADE. Dinamika Hukum Administrasi Indonesia mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bengkulu: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Martitah. Ptun Dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang, Jawa Tengah: 2018.
- Mujhad, M. Hadin. Komentar Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Yogyakarta: Genta Publishing 2015
- Yasin, Muhammad. Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR). Depok: 2017.

Jurnal :

- Aji Ersyta Fellista dkk. Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Meliputi Tindakan Faktual. *Justiciabelen* Vol 1 No 1 (2018)
- Penu A Stephanie dkk. PERLUASAN KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI TINDAKAN FAKTUAL PEMERINTAH. *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 12, Desember 2024.
- Philipus M. Hadjon. PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NO. 30 TH. 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Administrative Court According to Law No. 30 Year 2014 on Government Administration Law). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 51-64
- Ratnaningsih Erna. TUNTUTAN GANTI RUGI PADA PERLUASAN KEWENANGAN PTUN (STUDI KASUS BANJIR JAKARTA DAN BANJARMASIN). *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 7, Issue 1, January 2023
- Ridwan. Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 11 No. 1 Mei 2022, 89-108

- Spaltani Bitu Gadsia. Rekonsesi Perbuatan Pemerintah (Bestuurhandeling) Guna Mewujudkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan. Vol. 2 No. 1 (2024): KNAPHTN (Desember)
- Suanro, dkk. Makna Tindakan Administrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Penafsiran Hukum. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 6 No. 2, September 2021
- Sudarsono dkk. Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintahan Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. MIMBAR YUSTITIA Vol.6 No.1 Juni 2022.
- Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, and Nathanael Grady, “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,” NEGARA HUKUM: Vol. 11, No. 1, Juni 2020
- Ridwan, Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 11 No. 1 Mei 2022, 89-108.
- Ary Wahyudi. Eksekutorial Putusan Ptun Sebagai Lembaga Yudikatif. POLITEA Jurnal Politik Islam. Vol. 4No.1Januari-Juni 2021.
- M Arauf, Gusliana HB. Penerapan Ganti Rugi terhadap Warga Masyarakat Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Riau Law Journal: Vol. 7, No. 2, November (2023),
- Irfan Syafar dkk. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Keperdataan Dan Administrasi Negara. Sawerigading Law Journal Vol. 3/No. 1/Maret/2024.
- BIMASAKTI, MA. *Onrechtmatig overheidsdaad oleh pemerintah dari sudut pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018.*
- Barokah, Muhamad Raziv & Anna Erliyana. PERGESERAN KOMPETENSI ABSOLUT DARI PERADILAN UMUM KE PERADILAN TATA USAHA NEGARA: GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD). *Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-51 No.4 Oktober-Nopember 2021.*

Pietersz, Jemmy Jefry. Rekonseptualisasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 2 No. 1 (2024): KNAPHTN.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata U

Putusan PTUN / YURISPRUDENSI

Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr adalah putusan mengenai gugatan Tindakan Faktual (TF) yang diputus pada tanggal 5 November 2020.